

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor, Ghalia Indonesia. 2007.
- Anis Zakaria Kama, *Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2012.
- Ayip Rosidi. *Kebudayaan Daerah dan Keindonesiaan*. Lihat dalam Majalah Prisma edisi Februari 1979 terbitan LP3ES dalam tema *Pluralisme Budaya; Dari Batak sampai Badjo*.
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995.
- BN Marbun, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial sampai Saat Ini (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2005).
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah*, Aksara, Jakarta, 1985 .
- David Held, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris (Jakarta: Akbar Tanjung Institutie, 2006.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002.

Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, ctk. 2, Bandung, Djambatan, 2004.

Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet I (Jakarta, Bumi Aksara, 1990).

H. Djoko Sudantoko, dilema otonomi daerah, Andi, Yogyakarta, 2003.

Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widayasanra Indonesia, Jakarta, 2007.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005).

Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Joko J. Prihatmoko, *mendemokratiskan pemilu dari sistem sampai elemen teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Joko J. Prithatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta, pustaka pelajar. 2005.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung, Alumni, 2004).

Mas“oed, Mochtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Mashuri Maschab, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Akuari, Jakarta, 1999.

Mengenai penjelasan beberapa Undang-undang tentang Otonomi Daerah lihat, Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, edisi revisi (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990).

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 4. Konfigurasi politik, menurut Moh. Mahfud MD mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

Ni'matul Huda,*Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2007.

Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010.

Nisjar S. Karhi, , *Beberapa catatan Tentang Good Governance*, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 2, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005.

Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Surabaya, Universitas Airlangga, 1992.

Pratikno, “*Desentralisasi Pilihan Yang Tidak Pernah Final*” dalam buku “*Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*”, Editor. Abdul Gaffar Karim. Cet III (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011).

- Pratikno, “Desentralisasi: Pilihan yang Tidak Pernah Final,” dalam Abdul Gaffar Karim (ed.) Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- R.G Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- S.F. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Cet. II. Yogyakarta; FH UII Press, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Alumni, 1987.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997.
- Syamsudin Haris (ed), *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press dan Obor, 2006.
- Syaukani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kasatuan*, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2002.
- The Liang Gie, Pertumbuhan *Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, cetakan ke 12, Gunung Agung Jakarta, 1998.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahsa Indonesia*. Ctk III. Jakarta; Balai Pustaka, 1990. hlm 52.

Perundang-undangan, Internet dan Jurnal

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum,

Undang-Undang no 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang no 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang no 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

HM.Thalhah, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, dalam *Jurnal Hukum* no. 3 vol. 16 Juli 2009.

Media Indonesia tanggal 30/03/2013.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/246390-kemendagri--3-alasan-dicky-chandra-mundur>

<http://news.okezone.com/read/2012/01/25/338/563486/ini-dia-penyebab-prijanto-mundur-jadi-wakil-gubernur-jakarta. diunduh pada tanggal 03-06-2015>

<http://otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/709-desain-baru-pemilukada-cegah-konflik>

<http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/173-evaluasi-sistem-pilkada-langsung7>

<http://palembang.bpk.go.id/files/2009/11/DITAMA-BINBANGKUM-Asas-Dekonsentrasi-dan-Asas-Tugas-Pembantuan-Dalam-Penyelenggaran-Pemerintahan.pdf>

<http://www.pemkabsleman.go.id>